

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DAERAH KEPULAUAN  
(STUDI PELAYANAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KECAMATAN JEMAJA DAN JEMAJA TIMUR)**

Ismi Cahyati<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup>, Edison<sup>3</sup>  
170563201038@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Maritim Raja Ali Haji

*Abstract*

*Population administration is a series of activities for controlling and structuring population data through registration, civil registration, management of Population Administration information for public services and development of other sectors. Based on the results of field observations, the shortage of staff in the information technology department at the UPT Disdukcapil Office, Anambas Islands Regency and network operators in Jemaja District has not been stable, hampering the SIAK process. This study aims to determine the effectiveness of population administration services through the SIAK application and the factors that hinder its application in the UPT Disdukcapil, Anambas Islands Regency. This study uses a descriptive type approach with data sources used are primary data and secondary data, where data collection uses technical observation, interviews and documentation. The data that has been obtained were analyzed using data reduction steps, data presentation and conclusion drawing. In the study of the effectiveness of this study using Duncan's theory. The results of this study indicate that the implementation of SIAK services has not gone well by looking at the indicators of the objectives, timeframe and targets in these indicators, which are still constrained by internet network access, the indicators, procedures and socialization in these indicators are carried out even though they are not optimal, then on the adaptation indicators. Based on the capacity building of the UPT Disdukcapil staff, they have not carried out maximum training, only learning from the Regency Disdukcapil and based on the facilities and infrastructure there is no shortage of human resources and tools used to carry out SIAK, this is because the budget from the UPT Disdukcapil, Anambas Islands Regency exists. The conclusion of this study is the effectiveness of the application of SIAK at UPT Disdukcapil Anambas Islands Regency seen from the indicators of achieving goals, integration and adaptation are going well.*

**Keywords:** *Effectiveness, E-Government, SIAK*

**I. Pendahuluan**

Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan”. Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003) Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.(Achmadi, 2015)

Menurut Rachel Silcock, *E-Government* adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman layanan pemerintah untuk memberi manfaat bagi warga negara, mitra bisnis, dan karyawan. *E-Government* terus mendorong untuk berinovasi dan menciptakan, mengembangkan mode layanan publik baru di mana semua organisasi publik dan instansi pemerintah memberikan layanan yang modern, terintegrasi, dan tanpa batas bagi warganya. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah bukanlah lagi searah yakni topdown melainkan membangun kemitraan antara pemerintah dan warga negara (Silcock, 2001).(Doramia Lumbanraja, 2020).

Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah , Paragraf 3 Bidang Komunikasi dan Informasi pasal 220 ayat 1 yang berbunyi “Bidang komunikasi dan informasi melaksanakan tugas perencanaan, pengembangan dan penataan informasi, komunikasi publik dan persandian berbasis *e-government*.(Peraturan Bupati, 2016)

Tabel 1. Jumlah Menara Telekomunikasi

No.	Kecamatan Subdistrict	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Jemaja	6	6	6
2	Jemaja Timur	NA	NA	NA
3	Jemaja Barat	2	2	2
4	Siantan Selatan	6	6	6
5	Siantan	6	6	10
6	Siantan Timur	5	7	5
7	Siantan Tengah	2	2	2
8	Palatak	8	8	9
9	Siantan Utara	NA	NA	NA
10	Kute Siantan	NA	NA	NA
Kabupaten Anambas		35	37	40

Keterangan : NA (Not Applicable/ Data tidak dapat ditampilkan)

Sumber : Kabupaten Kepulauan Anambas dalam Angka 2020

Terlebih lagi untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Kabupaten Anambas yang memiliki banyak pulau-pulau yang terpisah oleh laut yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat sekitar. Apalagi sekarang di pulau-pulau di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki akses jaringan internet yaitu 4G (Telkomsel) yang memudahkan segala kemudahan telekomunikasi untuk manusia tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal dan tanpa harus melakukan tatap muka langsung, sekarang hanya dengan menggunakan *handphone/smartphone* dengan segala aktivitas manusia menjadi terjangkau. Hal ini lah yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan

Anambas menerapkan *e-Government* agar segala kebutuhan pelayanan masyarakat di pulau-pulau bisa terjangkau tanpa harus menyebrang laut untuk memperoleh pelayanan yang maksimal.

*E-Government* di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah beberapa tahun belakangan ini telah dilaksanakan tetapi masih belum berjalan dengan maksimal dan masih bertahap dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan masih terkendala akses jaringan yang belum lancar. Penerapan *e-government* di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah banyak diterapkan, akan tetapi penggunaannya hanya bisa digunakan untuk pihak dinas atau kecamatan/desa saja, masyarakat umum hanya bisa melihat apa saja informasi yang telah di unggah oleh pihak-pihak dinas atau kecamatan tersebut.

Contohnya untuk pengiriman berkas dari kecamatan atau desa ke kabupaten yang ingin cepat dikirim tanpa harus menyebrang laut untuk pergi mengantarnya langsung. Perkembangannya masih baru di sekitar kebutuhan dari perangkat desa-desa atau kecamatan/kecamatan terluar. Dikarenakan *e-government* baru di mulai di pulau-pulau terpencil dan baru di terapkan di perangkat kecamatan/desa saja dan masyarakat belum bisa merasakan *e-government* tersebut.

Di Kecamatan Jemaja sendiri *e-government* baru diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPT Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Anambas yang letaknya di Kecamatan Jemaja. Sebagai salah satu langkah untuk membantu dan mempermudah pekerjaan di bidang kependudukan maka diterapkannya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), penerapan SIAK ini di Kecamatan Jemaja sangat membantu masyarakat dalam memperoleh produk Disdukcapil (KTP, KK, KIA, Akta Kematian dan Kelahiran, Surat Pindah, dan lain sebagainya). UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas yang letaknya di Kecamatan Jemaja ini mencakup tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Kecamatan Jemaja Barat. Dengan diterapkan SIAK ini masyarakat dari Kepulauan Jemaja tidak perlu bersusah payah dan membuang banyak biaya untuk pergi ke Kabupaten dalam memperoleh produk Disdukcapil ini, masyarakat hanya langsung datang ke kantor UPT Disdukcapil yang letaknya di Kecamatan Jemaja tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena peneliti melihat bahwa dengan sudah adanya jaringan 4G di Kepulauan Jemaja, dan pada UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur telah menerapkan aplikasi SIAK untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus menyebrang pulau untuk ke kabupaten mengurus administrasi kependudukan yang diperlukan oleh masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "EFEKTIVITAS PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DAERAH KEPULAUAN (Studi Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur)"

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong) menyebutkan bahwa "penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Ma'ruf, 2017). Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan informan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 orang yang terdiri dari 3 perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, 2 perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kepulauan Anambas, dan 3 orang masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah analisis data menurut Miles dan huberman dalam buku Ulber Silalahi (2009: 339-341) Dari tiga alur kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam kegiatan analisis penelitian kualitatif yaitu merupakan sebagi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu saksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan.

### III. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan pendaftaran kependudukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota/kabupaten, yang mana pada pelaksanaannya bermula pada kelurahan/desa selaku awal dari pendaftaran penduduk sehingga masyarakat terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang di singkat SIAK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara maupun instansi pelaksanaannya.

SIAK merupakan sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus dengan tujuan menata sistem administrasi kependudukan agar tercapainya tertib administrasi juga membantu bagi petugas Pemerintah Daerah khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan layanan kependudukan.(Lestari et al., 2017) Dengan adanya SIAK bisa menjadi solusi dari permasalahan kependudukan yang ada. Adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan.

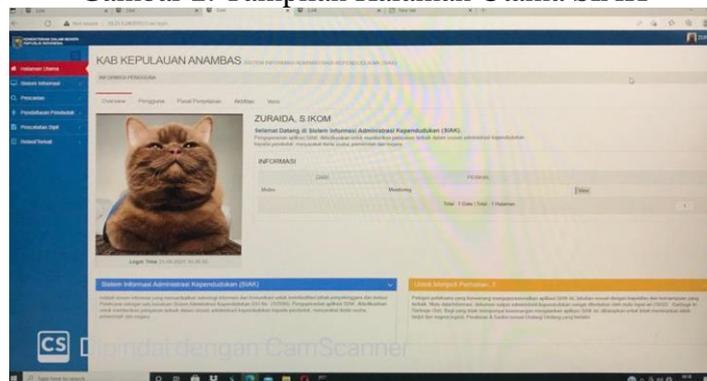
SIAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan pasal 2 bertujuan untuk 1) meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan muktahir; dan 3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.(Indonesia, 2019)

Gambar 1. Aplikasi SIAK



Sumber : UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Gambar 2. Tampilan Halaman Utama SIAK



Sumber : UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021

Efektivitas Penerapan E-Government Pada Daerah Kepulauan (Studi Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum berjalan dengan maksimal.

#### 1. Input

Menurut Susanto (2007) input merupakan suatu yang masuk kedalam sistem, dimana input merupakan dasar dari suatu yang akan dilaksanakan atau diwujudkan, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Input dapat dilihat dari fasilitas (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan oleh instansi, kemudian material (bahan baku) seperti data-data yang diperlukan kemudian akan diolah menjadi suatu informasi, dan faktor yang paling penting yaitu modal karena suatu program tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya modal.

Sarana dan prasarana merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu kegiatan maupun program. Sarana dan prasarana merupakan sebagai penunjang keberhasilan program. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan pasal 1 ayat 5 disebutkan sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai satu kesatuan. Pertama, input dalam penerapan SIAK belum berjalan cukup baik, sarana dan prasarana yang ada di UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur belum memadai.

Hal ini ditandai masih kurangnya alat untuk proses pelaksanaan SIAK masih kurang dikarenakan anggaran dari UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur tidak ada. Fasilitas yang ada pada kantor UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur merupakan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi masih belum memadai dalam proses berjalannya SIAK tersebut.

Seharusnya UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur melakukan seperti halnya dalam penelitian Witya Tryanti dan Aldrik Frinaldi yang berjudul “Efektivitas Implementasi E-Government dalam Pelayanan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang”. Menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang merancang dan melakukan beberapa strategi seperti melakukan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, mengolah dan menyajikan data kependudukan dengan baik serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang memuaskan.

## 2. Proses Produksi

Menurut Sutanta (2003) proses produksi adalah komponen sistem yang mempunyai peran utama dalam mengolah masukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi penggunaannya. Agar terjalannya suatu komunikasi informasi dengan baik dan proses produksi terlaksana dengan baik, maka untuk mengukur proses produksi ini terdapat dua faktor, yaitu sasaran dan proses sosialisasi. Dalam penerapan SIAK pada proses sosialisasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan belum maksimal, untuk proses sosialisasi belum berjalan maksimal karena dalam melakukan sosialisasi terhambat dengan adanya virus Covid-19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga proses sosialisasi tidak dapat dilakukan. Dalam pengintegrasian UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur harus dilakukan lebih jelas, hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui malas mengurus Administrasi Kependudukan seperti Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan Akte Perceraian. Seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 pasal 27 ayat 1 disebutkan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Dan pasal 28 ayat 2 disebutkan pembuatan akte kelahiran harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. Tetapi pada kenyataan dilapangan masyarakat masih sering telat mengurus akte kelahiran dikarenakan minimnya pengetahuan dalam persyaratan membuatnya.

## 3. Output

Output adalah unsur-unsur yang mempunyai berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Hasil yang dimaksud adalah dilihat dari produk dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Waktu sangat menentukan dalam proses pelaksanaan program tersebut apakah efektif atau tidak. Merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Indonesia, 2019) pada pasal 2 huruf a disebutkan meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Artinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, waktu sangat menentukan apakah suatu pelayanan dapat dikatakan efisien atau tidak.

Pada penerapan SIAK di UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur belum cukup maksimal. Hal ini dikarenakan pada kurun waktu proses pencetakan seperti KTP-el tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu selesai dalam 3 hari. Pada kenyataan dilapangan prosesnya bisa sampai seminggu bahkan lebih, dikarenakan jaringan internet di Kepulauan Jemaja belum stabil.

#### 4. Produktivitas

Menurut Sedarmayanti (2009) produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya pada organisasi yang biasanya dinyatakan dalam berbagai rasio dari keluaran yang dicapai pada sumber daya yang digunakan.

Peningkatan kemampuan merupakan persiapan sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dalam program yang dilakukan oleh organisasi atau pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada pasal 12 huruf c disebutkan tersedianya sumber yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana. Pada penerapan SIAK belum berjalan dengan baik, pada peningkatan kemampuan staf UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan pelatihan hanya saja belajar dari Disdukcapil Kabupaten, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran dalam UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut. Untuk sarana dan prasarana masih belum memadai seperti kurangnya sumber daya manusia di bidang IT dan masih kurangnya alat dalam pengoperasian SIAK itu sendiri.

### **Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur**

Kepulauan Jemaja sendiri terdapat beberapa desa yang terpisah dari pusat kecamatan, sehingga untuk mengurus segala urusan seperti administrasi kependudukan harus dilakukan langsung di kecamatan tersebut. Dengan adanya SIAK yang diterapkan di UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur tersebut hanya mempermudah masyarakat Kepulauan Jemaja untuk mengurus administrasi kependudukan tanpa harus menyebrang dan mengeluarkan biaya lebih untuk ke kabupaten. *E-government* atau pemerintah berbasis elektronik seharusnya mempermudah masyarakat dengan pemerintah menyediakan layanan berbasis elektronik seperti aplikasi atau *website* yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pada konteks pengertian *e-government* yaitu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan memuaskan masyarakat itu belum terlaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat bahwa, masyarakat masih harus datang kekantor untuk mengisi data-data yang diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut.

Dan pada hasil wawancara dengan pihak UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur mereka juga mengatakan belum bisa membuat layanan seperti aplikasi atau *website* untuk masyarakat umum dalam mengurus administrasi kependudukan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk mengisi data yang diperlukan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli di bidang IT dan kurangnya sarana prasarana begitu juga tidak adanya anggaran sehingga memperhambat proses penerapan *e-government* di Kepulauan Jemaja. Ini sesuai dengan penjelasan dari pihak Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwasanya untuk meningkatkan kualitas jaringan internet di Kepulauan Jemaja itu memerlukan biaya yang besar, terlebih penduduk di Kepulauan Jemaja masih sedikit sehingga minat dari provider untuk

mengembangkan telekomunikasi masih kurang, karena tidak begitu profit. Tetapi masih ada beberapa program dari kementerian Kominfo yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi untuk masyarakat diseluruh Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut beberapa faktor yang memperhambat penerapan e-government di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur atau sarana dan prasarana yang ada di UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur belum memadai seperti masih kurangnya alat untuk proses pelaksanaan SIAK. Kemudian jaringan internet dan *wifi* belum stabil sehingga menghambat pelaksanaan SIAK, seperti yang telah disampaikan oleh Staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bahwa dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mahal dan minat provider untuk mengembangkan telekomunikasi di Kepulauan Anambas kurang. Hal ini termasuk salah satu penghambat dalam proses pelaksanaan SIAK di daerah kepulauan seperti di Kepulauan Jemaja.
2. Tidak ada anggaran untuk UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur hal ini sangat mempengaruhi dan memperhambat proses pelaksanaan SIAK tersebut. Karenanya fasilitas yang terdapat di kantor UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur kurang memadai, seperti alat untuk proses pelaksanaan SIAK masih kurang dan kemudian tidak bisa melakukan pelatihan terhadap staf/pegawai UPTD tersebut sehingga pihak UPTD meminta bantuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membantu kesulitan yang tidak bisa diatasi dari staf/pegawai UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur.

#### IV. Kesimpulan

Kesimpulannya terkait Efektivitas Penerapan E-Government di Daerah Kepulauan (Studi Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur) ada beberapa tahapan yang belum berjalan secara optimal dan ada indikator yang sudah optimal dilakukan. Sesuai keinginan dan tujuan untuk mencapai keberhasilan pemasaran yaitu dalam indikator ada 4 indikator yaitu Input, Proses Produksi, Output dan Produktivitas. Secara rinci dapat dijelaskan 4 indikator yang dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Input dalam penerapan SIAK belum berjalan cukup baik, dikarenakan kurangnya alat untuk proses pelaksanaan SIAK. Fasilitas yang ada di Kantor UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur merupakan hasil bantuan dari pemerintah pusat, tetapi masih belum cukup memadai untuk proses berjalannya pelaksanaan SIAK. Hal ini dikarenakan pada UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur tidak memiliki anggaran.
2. Proses Produksi dalam penerapan SIAK pada proses sosialisasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan sudah cukup baik, untuk proses sosialisasi belum berjalan maksimal karena dalam melakukan sosialisasi terhambat dengan adanya virus Covid-19 dan adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga proses sosialisasi tidak dapat dilakukan,

3. Output yang dihasilkan dalam penerapan SIAK belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pada kurun waktu proses pencetakan seperti KTP-el tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu selesai dalam 3 hari. Pada kenyataan dilapangan prosesnya bisa sampai seminggu bahkan lebih, dikarenakan jaringan internet di Kepulauan Jemaja belum stabil.
4. Produktivitas dalam penerapan SIAK belum berjalan dengan baik, pada peningkatan kemampuan staf UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilakukan pelatihan hanya saja belajar dari Disdukcapil Kabupaten, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran dalam UPT Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut. Untuk sarana dan prasarana masih belum memadai seperti kurangnya sumber daya manusia di bidang IT dan masih kurangnya alat dalam pengoperasian SIAK itu sendiri.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan melakukan analisis data dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran yang tentu nantinya diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran yang dilakukan agar dalam pelaksanaan aplikasi SIAK di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah saran-saran yang dimaksud dalam penelitian ini:

1. Pada konteks proses produksi, dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan aplikasi SIAK perlu diadakan, seperti UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur lebih memperhatikan dan menekankan proses sosialisasi pada pihak desa/kelurahan dan RT/RW. Kemudian agar informasi yang diberikan dapat tersampaikan pada masyarakat, pihak UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur sebaiknya lebih memperhatikan terkait prosedur persyaratan pendaftaran administrasi kependudukan, seperti dengan menempelkan brosur atau spanduk pada titik-titik tertentu seperti di kantor desa atau jalan.
2. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas harus lebih sering melakukan pelatihan untuk pegawai UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, dengan mengirimkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengajar atau melatih staf/pegawai UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur agar lebih memahami proses berjalannya aplikasi SIAK.
3. UPTD Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur diharapkan lebih meningkatkan sarana dan prasarana dalam penunjang pengelolaan aplikasi SIAK. Setiap sumber daya manusia diharapkan mampu menciptakan sinergi dalam melaksanakan tugas hariannya sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif.

## V. Daftar Pustaka

- Achmadi. (2015). *Kewajiban Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi*. 4(1), 64–75.
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Indonesia, M. D. N. R. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan*. 8(5), 55.
- Lestari, Lengkong, F. D. J., & Tampi, G. B. (2017). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*. 9(1), 76–99.

- Ma'ruf, M. (2017). *Tingkat Berpikir Kreatif Siswa Berdasarkan Gender Dalam Memecahkan Masalah Matematika Materi Lingkaran Kelas Viii-J Smpn 1 Pogalan Trenggalek Tahun Pelajaran 2016/2017*. 37–54.
- Peraturan Bupati, K. A. (2016). Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ulber Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Peneitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Kepulauan Anambas, serta masyarakat yang sudah memberikan kerjasama dalam penelitian.